



KULON PROGO SMART CITY

be innovative and productive city



ANALISIS STRATEGIS SMART CITY DAERAH





BUKU I

ANALISIS STRATEGIS SMART CITY

KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2018-2028

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

I. PENGANTAR	1
II. ANALISA MASA DEPAN	3
III. ANALISIS KESIAPAN DAERAH	7
3.1 Struktur	7
3.1.1 Sumber Daya Manusia	7
3.1.2 Sumber Daya Manusia TIK	12
3.2 Infrastruktur	14
3.2.1 Server	15
3.2.2 Aplikasi	17
3.3. Suprastruktur (Kebijakan Dan Kelembagaan)	23
IV. ANALISIS GAP	25
4.1 Analisis SWOT	25
4.2 Permasalahan	29
V. ANALISIS VISI PEMBANGUNAN DAERAH	29
5.1 Sasaran Smart City Daerah	29
5.2 Analisis Visi Pembangunan Daerah	34
DAFTAR PUSTAKA	38

ANALISIS STRATEGIS SMART CITY DAERAH

I. Pengantar

Kabupaten Kulon Progo terletak di antara $7^{\circ}38'30''$ – $7^{\circ}58'3''$ LS dan $110^{\circ}1'37''$ – $110^{\circ}16'26''$ BT. Lokasi Kabupaten Kulon Progo dilihat secara posisi geostrategis mempunyai posisi yang menguntungkan. Kabupaten Kulon Progo yang terletak di bagian barat DI Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, merupakan 'pintu gerbang' Provinsi DI Yogyakarta yang menghubungkan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan yang terletak dengan bagian barat Pulau Jawa dan utara Pulau Jawa. Penduduk yang berjumlah lebih kurang 445.655 jiwa menjadi kebutuhan mengikuti dinamika perkembangan Teknologi Informasi dalam rangka menjawab dinamika wilayah seiring pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang mulai beroperasi tahun 2019 dan mempunyai potensi alam dan wisata di perbukitan Menoreh serta menjadi bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur.

Selain itu posisi strategis Kabupaten Kulon Progo berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia menghubungkan dengan pusat-pusat ekonomi Pulau Jawa Bagian Selatan, Bagian Utara dan Bagian Timur Jawa melalui Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Jawa dan Kereta Api Lintas Selatan Jawa.



Gambar 1.1
Peta Posisi Strategis Kabupaten Kulon Progo

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah: ***“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”***. Untuk mencapai visi dimaksud, maka dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
- 2) Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.
- 4) Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Untuk mewujudkan Misi ketiga *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram*. Diperlukan tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Misi ini menjadi penting karena dalam rangka mewujudkan misi yang lain diperlukan tata kelola pemerintahan, sehingga tercapai efisiensi, efektivitas dan budaya kerja yang lebih produktif berbasis teknologi, informasi dan komunikasi menuju kabupaten cerdas (*Smart City*).

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya tuntutan mutu pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien, perlu adanya kerangka acuan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik (*e-Government*). Untuk mempercepat dan memberikan pedoman implementasi menuju Kabupaten cerdas, maka perlu disusun Master Plan *Smart City*.

II. Analisis Masa Depan

Ditinjau dari aspek struktur perekonomian Kabupaten Kulon Progo didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai merupakan sektor yang berkontribusi sangat tinggi terhadap struktur perekonomian sektor-sektor lainnya. Namun sebaliknya kontribusi sektor tersebut dari tahun ke tahun senantiasa kecenderungan penurunan peran mulai dari tahun 2013-2017 berturut-turut sebesar 21,17%, 20,44%, 20,42%, 19,96% dan pada tahun 2017 menjadi 19,10%. Hal ini disebabkan terdapat perubahan peruntukan tanah pertanian, kehutanan dan perikanan mengikuti dinamika pembangunan. Selain itu meningkatnya kontribusi signifikan sektor skunder dan tertier yang menyebabkan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi cenderung tertekan menjadi turun.

Sektor kedua yang memiliki kontribusi besar, yaitu sektor perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor ini dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sebesar 13,00%

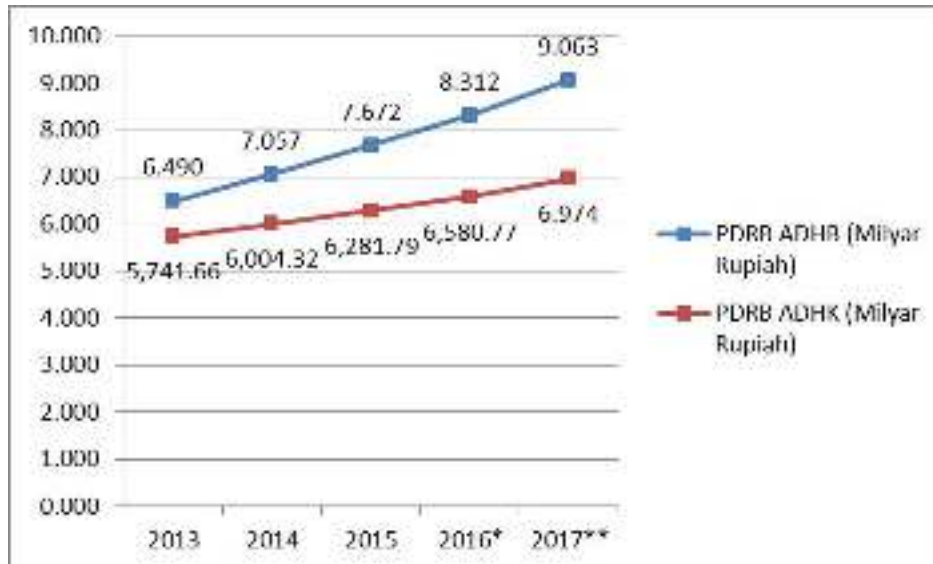
meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 14,00%. Hal tersebut disebabkan karena terjadinya pertumbuhan yang cukup signifikan pada sub sektor perdagangan besar bukan mobil yang berperan sebesar 12,42% pada tahun 2013 dan meningkat sampai sebesar 13,37% pada tahun 2017.

Sektor terakhir yang berkontribusi terbesar ketiga adalah sektor Industri Pengolahan, yaitu sebesar 12,03% pada tahun 2013, mengalami fluktuasi sampai pada tahun 2017 memiliki kontribusi sebesar 12,43%. Dari sektor tersebut, sub sektor Industri Makanan dan Minuman memiliki kontribusi yang terbesar. Seiring dengan dicanangkannya Kawasan Peruntukan Industri Sentolo, maka sektor ini diharapkan akan tumbuh sangat signifikan mengalami pertumbuhan positif, dan akan mengalami laju pertumbuhan yang tinggi.

Pada sektor konstruksi, meskipun pada tahun 2013 hanya mempunyai kontribusi sebesar 8,66% dan meningkat sebesar 9,18% pada tahun 2017. Adanya proyek penyelesaian Pelabuhan Adhikarto di Glagah, pembangunan dan pelebaran jalan nasional, perbaikan infrastruktur, dan pembangunan prasarana dan sarana fisik lain diharapkan mendorong pertumbuhan yang cukup stabil pada sektor konstruksi. Kenaikan sektor konstruksi dipengaruhi oleh pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport*, pembangunan jalan Bedah Menoreh, pembangunan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan penyangga KSPN Borobudur, pembangunan embung dan pembangunan lainnya yang berkaitan dengan layanan dasar masyarakat.

Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Kulon Progo dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa yang merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya

manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.



Sumber : BPS Kulon Progo, 2017 BPS DIY, 2018
*angka sementara **angka sangat sementara

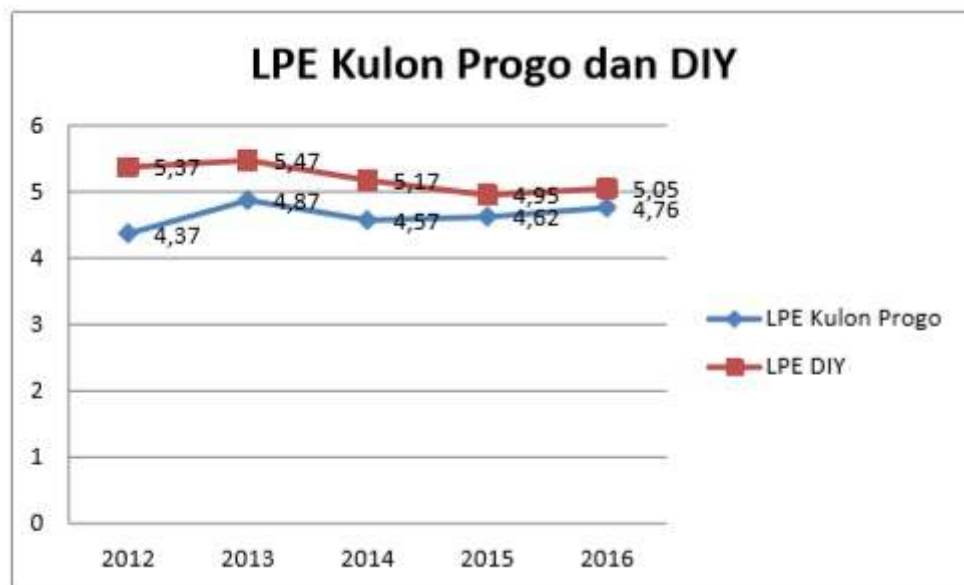
Gambar 2.1
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2013 – 2017 (Milyar rupiah)

Berdasarkan gambar di atas, nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami kenaikan pada tahun 2017 mencapai 9,06 trilyun rupiah, tahun 2016 mencapai 8,3 trilyun rupiah, sedangkan pada tahun 2015 mencapai 7,6 trilyun, tahun 2014 mencapai 7,05 trilyun rupiah, tahun 2013 mencapai 6,49 trilyun rupiah. Nilai PDRB yang selalu mengalami kenaikan tersebut mengindikasikan selalu terjadi pertumbuhan positif PDRB Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut sejalan dengan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo yang banyak dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Sementara itu PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010), pada tahun 2017 mencapai 6,9 trilyun rupiah, tahun 2016 nilai PDRB mencapai sebesar 6,5 trilyun rupiah, tahun 2015

sebesar 6,28 trilyun rupiah, tahun 2014 sebesar 6,0 trilyun rupiah, dan tahun 2013 sebesar 5,74 trilyun rupiah.

Nilai PDRB Kabupaten Kulon Progo atas dasar harga konstan 2010, pada tahun 2013 sebesar 5,74 triliun rupiah, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 5,47 triliun atau pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 4,87%. Untuk tahun 2014 terjadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 4,57%. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan kembali pada tahun 2015-2017 berturut-turut sebesar 4,62%, 4,76% dan 5,97%. Secara umum keterbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo setiap tahunnya masih lebih rendah dibanding DIY yang digambarkan sebagai berikut.



Sumber : BPS Kulon Progo, 2017 BPS DIY, 2018

Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016
Tahun 2013 – 2017 (Milyar rupiah)

Percepatan pertumbuhan tahun 2017 terjadi percepatan pada beberapa sektor yang menyumbang, yaitu: sektor pertambangan dan penggalian sebesar 13,68%, konstruksi sebesar 12,09%, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,46%. Untuk sektor pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar

1,72% menjadi sebesar 13,68% pada tahun 2017, hal ini dipengaruhi adanya pematangan lahan/pengurangan lahan bandara dan pengurangan lahan untuk relokasi perumahan warga terdampak bandara yang banyak mengambil tanah urug dari wilayah Kecamatan Kokap. Untuk sektor konstruksi laju pertumbuhan dari tahun 2016 sebesar 6,48% menjadi sebesar 12,09% pada tahun 2017, yang disebabkan karena pada tahun 2017 sudah dimulainya tahap fisik pembangunan bandara NYIA. Selanjutnya untuk perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami laju pertumbuhan dari tahun 2016 sebesar 6,20% menjadi 8,46% pada tahun 2017, karena adanya pembebasan lahan bandara/pembayaran ganti rugi tanah yang telah diterima oleh warga terdampak bandara. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo kedepan akan terus meningkat seiring dengan berbagai jenis kegiatan Antara lain: dimulainya pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport, pembangunan kawasan penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur.

III. Analisis Kesiapan Daerah

3.1 Struktur

3.1.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo secara administrasi tahun 2017 sebesar 445.655 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 221.293 jiwa dan perempuan 224.362 jiwa dengan jumlah rumah tangga 149.172 rumah tangga. Jumlah penduduk selalu mengalami pertumbuhan pada kurun empat tahun terakhir, pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,30%, tahun 2015 tumbuh sebesar 4,44%, tahun 2016 tumbuh 0,30% dan pada tahun 2017 tumbuh 1,87 %. Jumlah keluarga pada tahun 2014 juga mengalami kenaikan menjadi 138.984 keluarga, pada tahun 2015 menjadi 145.152 keluarga, tahun 2016 menjadi 146.414, dan pada tahun 2017 menjadi 149.172. Pertumbuhan penduduk disebabkan karena adanya kelahiran, kematian dan pindah datang

penduduk. Secara rinci perkembangan penduduk Kabupaten Kulon Progo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. 1
Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan
Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2017

No.	Tahun	Penduduk			Pertumbuhan (%)	Jumlah Kepala keluarga
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	2014	206.494	210.979	417.473	0,30	138.984
2	2015	216.651	219.472	436.123	4,44	145.152
3	2016	216.902	220.539	437.441	0,30	146.414
4	2017	221.293	224.362	445.665	1,87	149.172

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2018

Komposisi umur diketahui pada tahun 2017 jumlah penduduk berusia 0-4 tahun mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016 dari sebesar 25.908 jiwa menjadi 27.432 jiwa. Jumlah penduduk usia produktif (15-59 tahun) pada tahun 2016 sejumlah 271.255 jiwa dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 277.331 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk menurut batasan umur disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Umur Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2014-2017

No	Kelompok Umur	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1.	0 – 4	27.039	28.073	25.908	27.432
2.	5-9	29.480	32.165	30.965	32.242
3.	10-14	29.481	31.048	29.489	31.045
4.	15-19	28.952	32.468	31.273	32.308
5.	20-24	29.097	30.263	31.137	31.939
6.	25-29	26.659	27.282	27.358	28.408
7.	30-34	30.069	31.465	30.725	30.404
8.	35-39	30.203	31.354	31.216	32.351
9.	40-44	29.018	30.573	30.454	31.186
10.	45-49	32.024	32.182	32.071	32.368
11.	50-54	28.424	29.164	29.873	30.557

No	Kelompok Umur	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
12.	55-59	24.967	26.389	27.148	27.810
13.	60-64	19.430	20.212	21.275	21.593
14.	65-69	15.113	15.555	15.501	16.560
15.	70-74	14.625	14.645	13.953	13.846
16.	>75	19.162	22.430	24.031	25.246
JUMLAH		416.209	417.473	436.123	445.655

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2018

Distribusi penduduk dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pengasih, Sentolo, dan Wates. Kepadatan penduduk rata-rata kabupaten pada Tahun 2017 sebesar 760,17 jiwa/km². Kecamatan Wates merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi sebesar 1,537 jiwa/km², 3,70 kali lebih padat dibanding Kecamatan Samigaluh yang memiliki kepadatan terendah 415,85 jiwa/km². Hal ini karena Kecamatan Wates merupakan pusat kegiatan dan pelayanan, namun memiliki luas wilayah terkecil di Kabupaten Kulon Progo.

Kecamatan Lendah dan Galur meskipun dari sisi jumlah penduduknya tidak sebanyak Kecamatan Sentolo dan Pengasih, namun kepadatan penduduknya lebih tinggi. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tinggi di Kabupaten Kulon Progo sejak Tahun 2014 sampai dengan 2017 yaitu: Kecamatan Wates, Lendah dan Galur.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan
Tahun 2014 – 2017

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan (%)
1	Temon	26.358	28.511	29.033	29.101	2,17
2	Wates	45.637	47.620	49.184	49.214	2,03
3	Panjatan	35.983	38.110	39.003	38.970	1,88
4	Galur	31.533	32.457	32.930	32.971	1,29
5	Lendah	39.324	40.461	41.180	41.305	1,72
6	Sentolo	46.981	48.856	50.224	50.217	1,81

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan (%)
7	Pengasih	48.227	50.252	51.460	51.496	1,78
8	Kokap	34.226	35.916	36.539	36.581	1,80
9	Girimulyo	23.835	24.726	25.216	25.206	1,65
10	Nanggulan	29.332	30.190	30.706	30.739	1,41
11	Samigaluh	27.127	28.449	28.741	28.814	1,50
12	Kalibawang	28.910	30.575	31.077	31.041	1,63
	Jumlah	417.473	436.123	445.293	445.655	1,74

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, 2018

Derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan yang dilihat dari Angka Melek Huruf (tidak buta aksara) penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Angka Melek Huruf di Kabupaten Kulon Progo

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka melek huruf (%)	93,13	93,36	94,19	94,3	96,90

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Kulon Progo, 2018

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah dibedakan menjadi dua yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM mengukur proporsi anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu, sedangkan APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Nilai APK dan APM Kabupaten Kulon Progo sebagai tabel berikut.

Tabel 3.5
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A.	APM (%)					
1.	SD/MI	97,72	103,53	101,59	101,59	100,65
2.	SMP/MTs	99,42	97,88	97,90	98,15	92,44
B.	APK (%)					
1.	SD/MI	97,83	99,75	99,76	99,44	97,45
2)	SLTP/MTs	97,09	101,20	97,15	98,72	98,71

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo, 2018

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Harapan Lama sekolah Kabupaten dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan, yang menunjukkan semakin tingginya harapan lama setiap anak yang bersekolah.

Tabel 3.6
Angka HarapanLama Sekolah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2013-2017

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,00	13,27	13,55	13,97	14,05

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2018

3.1.2 Sumberdaya Manusia TIK

ketersediaan tenaga pendukung keberhasilan Smart City masih rendah ditinjau dari keberadaan sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan yang menguasai atau mempunyai latar belakang pendidikan teknologi informasi dan berpendidikan S-2. Jumlah pegawai berlatar belakang pendidikan teknologi informasi sebesar 0,53% dan yang berlatar belakang pendidikan S-2 sebesar 4,18%. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan jumlah pegawai berlatar belakang teknologi informasi dari Non ASN, karena sampai saat ini masih moratorium ASN di daerah. Rendahnya ketersediaan tenaga pendukung keberhasilan Smart City di setiap perangkat daerah yang secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3.7
Jumlah Pegawai Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Berlatar Belakang TIK dan Berpendidikan S2 ke Atas
Tahun 2017

No	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Jumlah Berlatar Belakang TIK	Jumlah Berpendidikan S2 ke Atas
1	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	49	1	8
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	91	1	7
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24	0	3
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47	1	7
5	Dinas Kebudayaan	30	0	3
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	55	0	6

No	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Jumlah Berlatar Belakang TIK	Jumlah Berpendidikan S2 ke Atas
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	51	5	4
8	Dinas Kesehatan	735	5	25
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	33	6	3
10	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	27	0	4
11	Dinas Lingkungan Hidup	21	0	3
12	Dinas Pariwisata	33	0	4
13	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	113	0	6
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82	0	7
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	34	0	4
16	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	3.647	7	50
17	Dinas Perdagangan	77	0	4
18	Dinas Perhubungan	60	0	6
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	38	0	3
20	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	31	0	8
21	Dinas Pertanian dan Pangan	178	0	11
22	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	38	0	4
23	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	59	1	4
24	Inspektorat Daerah	49	1	14
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	16	0	2
26	Kecamatan Galur	24	1	2
27	Kecamatan Girimulyo	22	0	1
28	Kecamatan Kalibawang	22	0	2
29	Kecamatan Kokap	27	0	1

No	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Jumlah Berlatar Belakang TIK	Jumlah Berpendidikan S2 ke Atas
30	Kecamatan Lendah	20	0	0
31	Kecamatan Nanggulan	23	0	0
32	Kecamatan Panjatan	20	0	2
33	Kecamatan Pengasih	23	0	4
34	Kecamatan Samigaluh	24	0	2
35	Kecamatan Sentolo	25	1	1
36	Kecamatan Temon	21	0	2
37	Kecamatan Wates	23	0	2
38	Kelurahan Wates	11	0	1
39	Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum	4	0	2
40	RSUD Nyi Ageng Serang	75	0	2
41	RSUD Wates	350	4	25
42	Satuan Polisi Pamong Praja	53	0	2
43	Sekretariat Daerah	140	1	19
44	Sekretariat DPRD	35	0	4
Jumlah Total		6.560	35	274

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo, 2018

3.2 Infrastruktur

Kondisi keberadaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Kulon Progo masih memerlukan investasi secara bertahap dengan mempertahankan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas sesuai dengan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi untuk berjalannya eGovernment. Ketersediaan sarana prasarana infrastruktur Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

3.2.1 Server

Saat ini sudah tersedia ruang server yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan kondisi sebagai berikut:

1) Ruang server

Ruang server berguna untuk mengelola aplikasi dan database yang dilengkapi dengan peralatan pendingin. Lantai ruang server belum menggunakan *raised floor* untuk jalur installasi kabel baik kabel data maupun kabel listrik, AC, dan pemadam kebakaran.

2) Belum ada sistem pemadam kebakaran khusus

Alat pemadam kebakaran belum disediakan di ruang server

3) Pengamanan fisik ruangan

Untuk akses masuk ruang server belum memenuhi prinsip keamanan, dan belum ada log tercatat untuk petugas yang keluar masuk beserta aktivitasnya.

4) Sistem pendinginan masih konvensional menggunakan AC Ruang.

Luas ruang server yang tidak terlalu besar pendingin ruangan masih bisa digunakan dengan sirkulasi udara panas dan dingin harus mengalir dengan baik.

5) Server belum dikelola menggunakan teknologi virtualisasi.

Pengelolaan server masih secara konvensional dan manual

Adapun kondisi sarana dan prasarana dalam ruang server sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
Kondisi Sarana dan Prasarana RuangServer
Tahun 2017

No	Nama Perangkat	Volume	Kondisi
1	Ruang Server	6 x 3 m	Baik
2	AC	2 x 2 PK	Baik
3	Daya Listrik	20 KVA	Kurang
4	UPS	2 unit 1000 VA, 2 unit 2200 VA	Rusak

No	Nama Perangkat	Volume	Kondisi
5	KVM	8 Port	Baik
6	Rack Server	45 U <i>Close Rack</i>	Baik
7	Open Rack	45 U	Baik
8	Wallmount rack	8 U	Baik
9	Monitor	14 Inchi	Baik

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2018

Berdasarkan kondisi ini masih diperlukan adanya perawatan untuk keberlangsungan sarana pendukung dalam ruang server, serta selalu melakukan ceklist pemeriksaan terhadap kondisi sarana dan prasarana di ruang server. Server digunakan untuk berbagai macam fungsi diantaranya Server aplikasi, server portal web, server proxy, server database, server loadbalancer, maupun server virtualisasi. Ada beberapa server yang telah terpusat dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, namun masih ada beberapa server yang dikelola perangkat daerah lainnya.

Sedangkan secara rinci, inventarisasi perangkat server di ruang server Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.9
Perangkat Server Tahun 2017

No	Server	Type/ Series	Peruntukan	RAM	HDD	Ket.
1	NMS Server	HP Proliant ML150 G4	Network Monitoring System	4 GB	1 x 80 GB	Baik
2	VOIP Server	HP Proliant M110 G4	Server Voice Over IP	4 GB	1 x 80 GB	Baik
3	Proxy Server	Rakitan Intel S5500	Caching konten web	8 GB	2x80 GB	Baik
4	Smart-repot LPSE	HP Proliant DL 380 G7	Aplikasi pelaporan pengadaan yang melalui SPSE	16 GB	2 x 146 GB, 2 x 300 GB	Baik
5	Simda Keuangan	HP Proliant DL 380 G7	Aplikasi SIM Keuangan BPKP	12 GB	2 x 146 GB	Baik
6	Simda Keuangan	IBM System x 3250 M5	Mirroring Aplikasi SIM Pengelolaan Keuangan BPKP	16 GB	2 x 1 TB	Baik

No	Server	Type/ Series	Peruntukan	RAM	HDD	Ket.
7	SPSE	IBM System x 3650 M5	Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP	16 GB	4 x 300 GB	Baik
8	simasneg	IBM System x 3250 M4	Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian	16 GB	2 x 1 TB	Baik
9	Website desa	IBM System x 3250 M4	Hosting Website Desa	16 GB	2 x 1 TB	Baik
10	Aplikasi	IBM System x 3250 M4	Hosting Aplikasi	16 GB	2 x 1 TB	Baik
11	Geoportal	IBM System x 3200 M3	Aplikasi Geoportal	2 GB	1 x 250 GB	Baik
12	e-plan, emonev	IBM System x 3650 M5	Aplikasi e-plan, emonev	16 GB	1 x 300 GB	Baik
13	sigas	IBM System x 3100 M3	Aplikasi keluarga	2 GB	1 x 250 GB	Baik
14	simPel	IBM System x 3100 M3	Aplikasi persuratan dan tata naskah dinas	2 GB	1 x 250 GB	Baik
15	SIKS	HP Proliant DL320e Gen 8.v2	Aplikasi kearsipan	16 GB	1 x 300 GB	Baik

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2018

3.2.2 Aplikasi

Dalam pengembangan *e-Government* atau pemanfaatan TIK di Kabupaten Kulon Progo terdapat berbagai jenis Aplikasi atau Sistem Informasi, baik yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik maupun untuk meningkatkan kualitas kinerja tata kelola administrasi pemerintahan. Berdasarkan penilaian mandiri evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pelaksanaan *e-Government* di Indonesia dinilai dari 3 (tiga domain) yaitu : domain kebijakan, domain tata kelola, serta domain layanan. Hasil skor akhir evaluasi mandiri yang meliputi 3 (tiga) domain sebagai berikut :



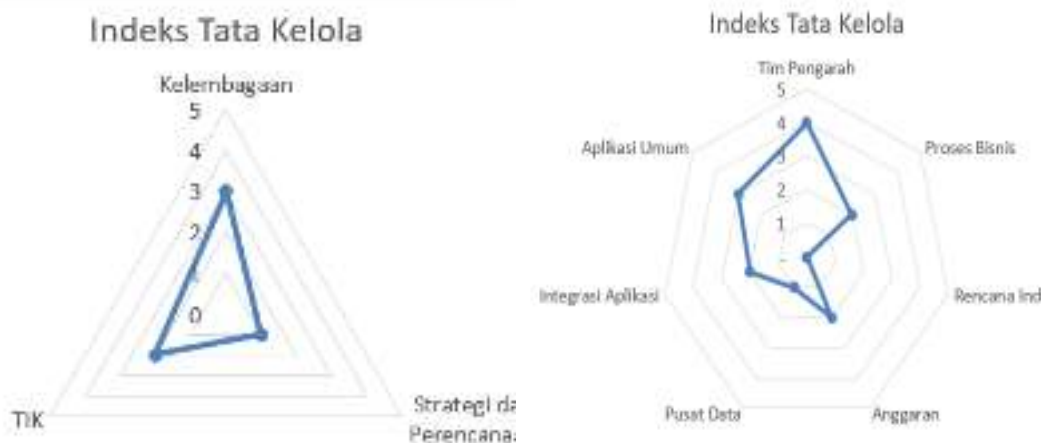
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2018

Gambar 3.1

Indeks Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2018

Berdasarkan evaluasi mandiri (*self assessment*) indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kulon Progo dengan rentang penilaian 0 sampai dengan 5 dengan nilai 2,82 dengan kategori Baik.

Domain tata kelola memiliki skor paling rendah dengan nilai 2,14 yang terkait dengan belum tersedianya Rencana Induk Pengembangan SPBE, Bisnis proses integrasi antar aplikasi, Ketersediaan pengoperasian Pusat Data yang memadai, dan penggunaan sistem berbagi pakai (*interoperabilitas*). Secara lengkap hasil penilaian tata kelola dapat dilihat pada diagram berikut:



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2018

Gambar 3.2

Indeks Tata Kelola SPBE Tahun 2018

Selanjutnya domain kebijakan dengan nilai indeks sebesar 2,94 atau kategori Baik, sebagian besar peraturan/kebijakan terkait pengembangan SPBE masih dalam tahap penyusunan sehingga belum dilakukan evaluasi perbaikannya. Secara lengkap indeks kebijakan digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2018

Gambar 3.3
Indeks Kebijakan SPBE Tahun 2018

Untuk domain layanan yang mempunyai skor paling tinggi dengan indeks 3,12 dengan Kategori Baik yang masih didominasi oleh aplikasi layanan administrasi pemerintahan daripada aplikasi layanan publik.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2018

Gambar 3.3
Indeks Layanan SPBE Tahun 2018

Profil aplikasi yang dikelola oleh perangkat daerah maupun terpusat di server Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagian besar Perangkat Daerah sudah menyelenggarakan *eGovernment* sesuai tupoksinya. Beberapa Perangkat Daerah yang belum Mengembangkan sistem informasi berkeinginan kuat untuk Mengembangkan sistem informasi yang memudahkan layanan publik.

Secara umum beberapa aplikasi sudah berjalan dengan baik yang bersumber dari Pemerintah, penyedia, pengembang aplikasi lokal. Untuk daftar aplikasi yang ada di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

Tabel 2. 4
Daftar Aplikasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2018

No.	Pengelola	Nama Aplikasi	Kegunaan	Pengguna
1	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Simasneg	Sistem Informasi Kepegawaian	Semua SKPD
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIM Penggajian	Pengelolaan gaji pegawai	Badan Keuangan dan Aset Daerah
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	SIMDA Keuangan	Pengelolaan Keuangan	Semua SKPD
4	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Geoportal	Data Geospasial	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
5	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	WebGIS	Sistem informasi berbasis Geographic Information System	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	MonevKu	Monev SKPD	Semua SKPD
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RencanaKu	Perencanaan Pembangunan Daerah	Semua SKPD
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bagian Organisasi	SakipKu	Akuntabilitas Kinerja	Semua SKPD
9	Badan Perencanaan Pembangunan	Pronangkis	Aplikasi program penanggulangan kemiskinan	Semua SKPD

No.	Pengelola	Nama Aplikasi	Kegunaan	Pengguna
	Daerah, Dinas Sosial PPPA			
10	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	JDIH/Improhuda	Informasi Produk Hukum	Bagian Hukum Setda
11	Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah	SIMUL	Target dan Realisasi Pengadaan Barang/ Jasa, Pengelolaan Pengadaan	Bagian Layanan Pengadaan
12	Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah	SI PL	Sistem Informasi Pengadaan Langsung	Seluruh OPD
13	Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah	SIRUP	Sistem Informasi Rencana umum Pengadaan	Seluruh OPD
14	Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah	SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Seluruh OPD
15	Bagian Organisasi	SKMKU	Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan, Dinkes, Puskesmas, Disdukcapil
16	Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah	SIMPATEN	Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	Kecamatan
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Satu Data	Sistem informasi data tunggal pemerintah daerah	Publik
18	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Simpel	Sistem Informasi Manajemen Persuratan Elektronik	Semua SKPD
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SIAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Kecamatan
20	Dinas Kesehatan	SIMPUS	SIM Puskesmas Online	Puskesmas
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	LAPOR	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat	Publik
22	Dinas Kesehatan	SIMO	Sistem Informasi Pengelolaan Obat	Puskesmas

No.	Pengelola	Nama Aplikasi	Kegunaan	Pengguna
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SIAPDES	Sistem Informasi Manajemen Aparatur Pemerintah Desa	Pemerintah Desa
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	IZINKU	SIM Perizinan	Publik
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	SIPJAKI	SIM Pembinaan Jasa Konstruksi	Publik
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	SIPO	SIM Perusahaan Online	Publik
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	SPIPISE	SIM Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik	Publik
27	Inspektorat	SIM Wisthle Blowing System (WBS)	SIM pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan	Inspektorat
28	RSUD Wates	SISRUTE	SIM RSUD Wates	RSUD Wates
29	RSUD Wates	RS PRO	SIM aplikasi Rumah Sakit berbasis Android	RSUD Wates
30	RSUD Wates	SIMRS	SIM Rumah Sakit	RSUD Wates
31	Setwan	AspirasiKU	Aspirasi Online DPRD Kabupaten Kulon Progo	Publik
32	Dinas Kominfo	Sidal Mantel	Sistem Informasi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Publik
33	Dinas Pendidikan	Dapodik	Data Pokok Pendidikan	Publik
34	Dinas Kesehatan	BumilKU	Sistem Informasi Monev Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
35	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ayo Kerja/LokerKU	Info lowongan kerja berbasis aplikasi	Publik
36	Dinas Perhubungan	SIM PKB	Aplikasi pengujian	Publik

No.	Pengelola	Nama Aplikasi	Kegunaan	Pengguna
			kendaraan bermotor (kir)	
37	DPU PKP	Rusunawa	Sistem informasi pengelolaan Rusunawa	Publik
38	Dinas Perdagangan	SIDA SASAR	Sistem Informasi Data Pasar	Dinas Perdagangan
39	Dinas Perhubungan	SIM Sarpras Jalan	Aplikasi data perlengkapan jalan	Dinas Perhubungan
40	Dinas Kesehatan	Labkes Online	Aplikasi Lab Kesehatan	Dinas Kesehatan
41	BKAD	SysMIOB	Sistem Aplikasi Obyek Pajak	BKAD

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo, 2018

3.3 Suprastruktur (Kebijakan dan Kelembagaan)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Pengelola program dan kegiatan *Smart City* dengan *leading sector* di Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas/Badan perangkat daerah sebagai pelaksana teknisnya.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik yang mendukung *Smart City* di Kabupaten Kulon Progo, telah diterbitkan beberapa regulasi sebagai payung hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

3. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi;
4. Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 47 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
8. Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 64 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, Serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah.
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2017 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Kulon Progo
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 101 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *E-Government* di Kabupaten Kulon Progo
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengadaan *Online* Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kulon Progo
19. Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 290/A/2018 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Kulon Progo
20. Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 291/A/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Kulon Progo *Smart City*.

IV. Analisis Gap

4.1 Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan dari *Strength*, *Weakness*, *Opportunities*, dan *Threats*. Seperti namanya, Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek, baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan baru. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S Humphrey pada tahun 1960-an dalam memimpin proyek riset di *Stanford Research Institute* yang menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500 (Novia Widya Utami jurnal.id, 2017)

Metode analisis SWOT merupakan alat yang tepat untuk menemukan masalah dari 4 (empat) sisi yang berbeda dengan aplikasi sebagai berikut:

- a. Bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang (*opportunities*) yang ada.
- b. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah keuntungan.
- c. Bagaimana kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi ancaman (*threats*) yang ada.

- d. Bagaimana cara mengatasi kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Dengan saling berhubungannya 4 faktor tersebut, maka membuat analisis ini memberikan kemudahan untuk mewujudkan visi dan misi suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

Terdapat 2 faktor pokok yang akan memengaruhi keempat komponen dasar pada analisis SWOT yaitu:

a. Faktor Internal (*Strength* dan *Weakness*)

Untuk faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam terdiri dari dua poin yaitu kekuatan dan kelemahan. Keduanya akan berdampak lebih baik dalam sebuah penelitian ketika kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan. Dengan demikian kekuatan internal yang maksimum jelas akan memberikan hasil penelitian yang jauh lebih baik. Adapun bagian bagian dari faktor internal itu sendiri ialah:

- 1) Sumber daya yang dimiliki
- 2) Keuangan atau finansial
- 3) Kelebihan atau kelemahan internal organisasi
- 4) Pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya (baik yang berhasil maupun yang gagal)

b. Faktor Eksternal (*Opportunities* dan *Threats*)

Ini merupakan faktor dari luar entitas, faktor ini tidak secara langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti yang terdiri dari ancaman dan peluang. Adanya peluang serta ancaman ini tentu saja akan memberikan data yang harus dimasukkan sehingga menghasilkan strategi untuk menghadapinya. Beberapa poin yang termasuk pada faktor eksternal ialah:

- 1) Trend
- 2) Budaya, sosial politik, ideologi, perekonomian
- 3) Sumber-sumber permodalan
- 4) Peraturan pemerintah

- 5) Perkembangan teknologi
- 6) Peristiwa-peristiwa yang terjadi
- 7) Lingkungan

Sebagaimana sebuah metode pada umumnya, analisa SWOT ini hanya dapat membantu menganalisa situasi yang sedang dihadapi oleh perusahaan atau sebuah organisasi. Dan metode ini bukan sebuah jawaban pasti yang mampu memberikan solusi pada tiap masalah yang sedang dihadapi, namun minimal akan memecah persoalan yang ada dengan mengurainya menjadi bagian-bagian kecil yang akan lebih tampak sederhana.

Setelah dilakukan pencermatan terhadap hasil pengolahan kuiseoner, maka dikelompokkan permasalahan ke dalam 4 kriteria Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman. Selanjutnya di analisis dengan mengoptimalkan kekuatan dan peluang untuk mengurangi (menegasikan) kelemahan dan ancaman. Selengkapnya hasil analisis SWOT terhadap pengembangan Teknologi Informasi kedepan dalam rangka mewujudkan Kulon Progo menuju kabupaten cerdas (*smart city*) sebagai berikut:

Tabel 3.1 Analisis SWOT Pengembangan Smart City Kabupaten Kulon Progo

Analisis SWOT – Strength, Weakness, Opportunities and Threats		
<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan dari kepala daerah untuk mewujudkan Kulon Progo menuju Smart City 2. Adanya potensi wisata dan UKM unggulan di daerah 3. Kebijakan daerah dalam pengembangan produk lokal ‘bela dan beli Kulon Progo’ 	<p>Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan sebaran SDM aparatur yang berbasis IT belum merata 2. Daya saing tingkat pendidikan dan ketrampilan masyarakat yang relatif rendah 3. Terbatasnya infrastruktur TIK milik Pemda 4. Layanan publik sebagian besar belum integrasi dan interoperabilitas data 5. Pendapatan daerah dalam APBD relatif rendah
<p>Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sarana prasarana TIK yang masif dari dunia usaha (provider) 2. Adanya komunitas, praktisi TIK lokal, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat di bidang TI 3. Adanya pengembangan kawasan strategis bandara NYIA dan KSPN Borobudur 4. Masyarakat sebagian besar sudah menggunakan teknologi informasi <i>mobile</i> 	<p>Strategi Peluang (S) dan Kekuatan (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S1-O2 : Gunakan kebijakan daerah dalam Smart City yang didukung komunitas, praktisi TIK lokal, akademisi dan LSM 2. S2-O3 : Optimalkan potensi wisata dan UKM untuk mendukung pengembangan kawasan strategis bandara NYIA dan KSPN Borobudur 3. S3-O3 : Manfaatkan kebijakan ‘bela dan beli Kulon Progo seiring pembangunan sarana prasarana TIK yang masif. 4. S2-O4 : Optimalkan potensi wisata dan UMKM unggulan daerah dengan teknologi informasi mobile 	<p>Strategi Kelemahan (W) dan Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W1-O2 : Sinergikan ketersediaan aparatur IT yang belum merata dengan komunitas, praktisi TIK lokal, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat di bidang TI 2. W2-O2 : Perbaiki kualitas SDM/pendidikan masyarakat yang relatif rendah dengan ketersediaan komunitas dan praktisi TIK lokal serta akademisi 3. W2-O1 : Tingkatkan daya saing pendidikan dan ketrampilan masyarakat dengan tersedianya layanan sarana prasarana teknologi informasi

		<p>4. W4-O1 : Tingkatkan Layanan publik sebagian besar belum integrasi dan interoperabilitas data dengan mengoptimalkan komunitas, praktisi TIK lokal, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat di bidang TI</p>
<p>Ancaman (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan teknologi yang sangat cepat 2. Tuntutan layanan publik dan informasi yang cepat, tepat dan terpadu 3. Masuknya bisnis ekonomi digital dari luar daerah yang cepat 	<p>Strategi Kekuatan (S) dan Ancaman (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S1-T3 : Memanfaatkan kebijakan Kepala daerah yang pro pengembangan TIK untuk meningkatkan bisnis ekonomi digital produk lokal 2. S2-T1 : Optimalkan pengembangan potensi wisata dan UKM unggulan daerah dengan perkembangan teknologi 3. S3-T3 : Optimalkan kebijakan daerah dalam pengembangan produk lokal ‘bela dan beli Kulon Progo’ dengan Mengembangkan tumbuhnya bisnis digital dan persaingan yang sehat. 	<p>Strategi Kelemahan (W) dan Ancaman (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W1-T1: Hindari kelemahan jumlah dan sebaran SDM aparatur yang berbasis IT belum merata dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. 2. W3-T1 : Perbaiki terbatasnya infrastruktur TIK milik Pemda dengan penyesuaian perkembangan teknologi yang sangat cepat. 3. W3-T2: Perbaiki layanan publik yang belum terintegrasi dengan mewujudkan layanan publik dan informasi yang cepat, tepat dan terpadu. 4. W3-T1 : Perbaiki kelemahan kualitas pendidikan dan ketrampilan masyarakat yang relatif rendah dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. 5. W5-OT: Tingkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat

4.2 Permasalahan

Permasalahan yang teridentifikasi dari hasil pengolahan kuiseoner, pengamatan lapangan yang dianalisis menggunakan SWOT, diperoleh permasalahan pengembangan Smart City di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

- a. Belum meratanya kualitas Sumberdaya Manusia TIK pemda dan masyarakat.
- b. Terbatasnya infrastruktur sarana prasarana Teknologi Informasi milik Pemda.
- c. Masih rendahnya integrasi dan interoperabilitas data antarAplikasi Pemda.
- d. Rendahnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengembangan Potensi unggulan wisata dan UKM.
- e. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan publik yang cepat, tepat dan terpadu.
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pendapatan daerah.
- g. Masih rendahnya penggunaan layanan belanja digital (*online*) untuk produk lokal daerah.

V. Analisis Visi Pembangunan Smart City

5.1 Sasaran Smart City Daerah

Tujuan dari realisasi Smart City adalah menjadikan Kabupaten Kulon Progo sebagai Kota Layak Huni terutama bagi generasi mendatang melalui optimalisasi berbagai hal dimulai dari cerdas tata kelola pemerintahan (*smart governance*), cerdas berkehidupan (*smart living*), cerdas masyarakat (*smart society*), cerdas ekonomi (*smart economy*), cerdas pemasaran potensi daerah (*smart branding*), dan cerdas lingkungan (*smart environment*). Untuk mencapai smart city, Kabupaten Kulon Progo harus tetap memperhatikan *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika pembangunan yang cepat terkait pembangunan bandara New Yogyakarta Internasional Airport yang mulai beroperasi

April 2019 dan sebagai kawasan penyangga Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Smart City Kabupaten Kulon Progo bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan dengan pengimplementasian teknologi informasi dan komunikasi. Adapun sasaran Smart City Kulon Progo berdasarkan pilar smart city adalah:

1. Smart Governance

Smart governance bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Adapun target dari *smart governance* ini adalah:

- a. Mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintahan yang cerdas (*Smart Bureucracy*)
 - 1) Terintegrasinya seluruh aplikasi penyelenggaraan pemerintahan mulai eplanning-ebudgeting- SPSE-monevKU- sakiPKU dalam Sistem Informasi Eksekutif (Dashboard)
 - 2) Integrasi aplikasi DPRD yang mewadahi pokok-pokok pikiran pada aplikasi perencanaan
 - 3) E-surat atau e-office sebagai sistem persuratan elektronik yang transaksional
 - 4) Integrasi data WebGIS, diantaranya terkait kondisi jalan, sarana pengairan, lokasi sekolah, fasilitas kesehatan, pemerintahan, dan sosial
 - 5) Optimalisasi aplikasi perangkat desa, Mengembangkan sistem informasi desa & aplikasi laporan keuangan desa
 - 6) Optimalisasi aplikasi Geoportal untuk meningkatkan kualitas penataan ruang dan data spasial
 - 7) Pengembangan simasneg sebagai layanan kepegawaian dan penghitungan kinerja
 - 8) Optimalisasi *Wistle Blowing System* (WBS) sebagai layanan aduan yang bersifat rahasia

- 9) Optimalisasi e-Arsip untuk pengelolaan arsip dinamis dan statis
 - 10) Optimalisasi portal Satu Data sebagai database terbuka yang dapat diakses publik secara luas
- b. Meningkatkan kualitas layanan publik (*Smart Public Service*)
- 1) Optimalisasi aplikasi IzinKu dalam layanan perizinan yang telah berbasis NIK, tracking dokumen, tanda tangan digital, serta respon kepuasan pelanggan
 - 2) Membangun *command center* sebagai tempat pemantauan terpadu berbagai pelayanan publik
 - 3) Optimalisasi LAPOR yang mengintegrasikan aduan dari seluruh layanan publik yang ada
 - 4) Mengembangkan layanan izin praktek dokter, bidan, dan industri rumah tangga secara online
 - 5) Terhubungnya seluruh layanan publik dengan *data ware house* kependudukan
 - 6) Optimalisasi aplikasi layanan akte kelahiran yang terintegrasi dengan seluruh fasilitas kesehatan
 - 7) Mengembangkan KIR Online yang dapat melayani booking, pemeriksaan, dan status kendaraan.
 - 8) Optimalisasi aplikasi Monev Penyedia sebagai mekanisme kontrol progres fisik dan keuangan kontrak
 - 9) Mengembangkan e-PBB untuk memudahkan pembayaran, pengecekan status pembayaran, dan monitoring target PBB
 - 10) Monev pendapatan untuk melakukan kontrol terhadap penambangan
 - 11) E-PDAM untuk mempermudah pembayaran dan pengecekan status
 - 12) Pendaftaran Online Poliklinik RSUD untuk booking layanan pemeriksaan
 - 13) Optimalisasi Sidalmentel, aplikasi perizinan dan retribusi menara telekomunikasi

2. Smart Branding

Smart branding memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan tampilan tata ruang daerah, wajah kota, dan pemasaran potensi dan kreativitas daerah dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Adapun target dari smart branding ini adalah:

- a. Mengembangkan ekosistem pariwisata (*Tourism branding*)
 - 1) Publikasi kalender event pariwisata dan budaya secara masif melalui dunia maya
 - 2) Mengembangkan aplikasi WisataKu untuk memudahkan mengakses informasi tempat wisata, tarif retribusi, dan pembelian tiket secara *online*
 - 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur lokasi wisata
- b. Mengintegrasikan destinasi wisata Kulon Progo dengan industri rumah tangga/ usaha kecil menengah yang memanfaatkan potensi lokal pada kawasan khusus (*Smart Village*)
 - 1) Mengembangkan jejaring pemasaran antar UKM dan pengelola wisata
 - 2) Mengemas industri pengolahan UKM sebagai tempat wisata minat khusus

3. Smart Economy

Smart economy bertujuan untuk mewujudkan suatu ekosistem yang mendukung aktivitas perekonomian masyarakat agar selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang mampu beradaptasi dengan kecepatan perubahan pada zaman ekonomi global saat ini. Adapun target dari smart economy ini adalah:

- 1) Mewujudkan sistem transaksi digital (*Smart Transaction*)
 - a. Mengembangkan aplikasi belabeliku.com sebagai pasar digital produk-produk lokal Kulon Progo
 - b. Mengembangkan Aplikasi PasarKu sebagai media informasi harga bahan pokok pasar negeri terkini dan penarikan retribusi secara digital (*e-retribusi*)

2) Mengembangkan basis data UKM Kulon Progo (*Smart UKM*)

Satu Database UKM sebagai sumber informasi profil UKM, aktivitas UKM, serta akses permodalan

4. Smart Living

Smart living bertujuan untuk mewujudkan lingkungan dan kondisi yang layak dan nyaman. Target dan sasarannya meliputi :

1) Mewujudkan kesehatan masyarakat

- a. Mengembangkan aplikasi BumilKu untuk memantau kondisi kesehatan dan ibu hamil disertai informasi HPL
- b. Layanan Ambulan 24 jam secara online
- c. Mengembangkan Aplikasi RumahKu sebagai informasi lokasi bedah rumah, penyumbang, gambar semula dan gambar akhir setelah dilakukan bedah rumah

2) Efisiensi dan penghematan energi

Mengembangkan aplikasi Smart Lighting LPJU

5. Smart Society

Smart society bertujuan mewujudkan ekosistem sosial masyarakat yang humanis dan dinamis agar mampu mendorong terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, , dan interaktif namun peka terhadap literasi digital. Adapun sasaran dari smart society adalah:

1) Mewujudkan Smart Education

- a. Mengembangkan layanan BelakarKu sebagai media interaksi tentang informasi kurikulum, materi belajar, serta latihan simulasi soal
- b. Mengoptimalkan PPBD Online yang mengintegrasikan penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi GIS
- c. Mengembangkan aplikasi penghubung antara orang tua siswa dengan sekolah
- d. Mengembangkan aplikasi E-Perpustakaan sebagai cara penelusuran katalog online, layanan pendaftaran, serta booking buku

2) Mewujudkan Smart People

Mengembangkan E-Naker, layanan aplikasi informasi lowongan kerja berdasarkan penelusuran minat setelah kelulusan sekolah serta informasi pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

6. Smart Environment

Smart environment memiliki sasaran untuk mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan. Sasaran Smart Environment meliputi :

- 1) Menambah ruang terbuka hijau yang nyaman
- 2) Memproteksi wifi publik dengan filter internet sehat
- 3) Mengembangkan Aplikasi Bank Sampah online sebagai pencatatan transaksi dan tabungan sampah
- 4) Mengembangkan aplikasi monev lingkungan sebagai cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan

5.2 Analisis Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan tantangan, isu-isu strategis dan permasalahan yang masih dihadapi daerah serta kondisi potensi wilayah Kabupaten Kulon Progo, maka untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan visi Pembangunan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 adalah: ***“Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang Sejahtera, Aman, Tenteram, Berkarakter, dan Berbudaya Berdasarkan Iman dan Taqwa.”***

Dalam melaksanakan visi tersebut ditetapkan 4 misi yang diukur keberhasilannya dengan indikator kinerja daerah sebagai berikut:

Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Daerah		Target			
		Tahap 1 2018	Tahap 2 2019	Tahap 3 2020	Tahap 4 2021
Misi I: Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya					
Tujuan/Sasaran Pokok	Indikator				
1. Terwujudnya Sumberdaya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	73,25	73,06	73,56	74,05
1. Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat	1. Rata-rata lama sekolah	8,65	8,73	8,80	8,88
	2. Harapan Lama Sekolah	14,25	14,49	14,73	14,79
	3. Angka melek huruf	97,48	98,33	99,19	100,00
2. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	75,03	75,04	75,04	75,04
	2. Angka Kematian Ibu	55,80	55,35	54,92	54,74
	3. Angka Kematian Bayi	8,79	8,52	8,46	7,84
3. Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budayadan prestasi generasi Muda	1. Cakupan pelestarian dan pengembangan budaya daerah	73,55	74,66	75,75	76,82
	2. Cakupan prestasi Generasi muda	31,70	38,07	44,45	50,82

Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Daerah		Target			
		Tahap 1 2018	Tahap 2 2019	Tahap 3 2020	Tahap 4 2021
Misi II: Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan					
1. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1. Gini Rasio	0,33	0,33	0,32	0,31
	2. Pertumbuhan Ekonomi	4,97	5,06	5,15	5,23
	3. Angka Kemiskinan	18,25	17,25	16,00	14,75
1. Meningkatnya pendapatan masyarakat	1. Angka pengangguran terbuka	3,05	2,90	2,75	2,50
	2. Pendapatan Perkapita Penduduk	16,87	17,39	17,90	18,41
Misi III: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram					
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	67,00	70,00	72,00	73,00
	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman	0,95	1,19	1,18	1,8
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1. Nilai akuntabilitas Kinerja pemerintahan daerah (AKIP)	BB	BB	BB	A
	2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP

Misi, Tujuan, Indikator Kinerja Daerah		Target			
		Tahap 1 2018	Tahap 2 2019	Tahap 3 2020	Tahap 4 2021
	3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,65	78,15	78,65	79,35
Misi IV: Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas					
1. Terwujudnya pembangunan kawasan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	72,93	73,80	74,05	75,07
1 Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	68,43	70,67	71,07	73,77
2 Meningkatkan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,04	63,31	63,58	63,84
3 Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Ruang	87,33	87,41	87,50	87,59

Sumber : RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022

Berdasarkan visi tersebut, maka Visi Smart City Kabupaten Kulon Progo 2023 adalah: ***“Terwujudnya Layanan dan Masyarakat Kulon Progo yang Kreatif dan Inovatif menuju Kabupaten Cerdas, Mandiri dan Sejahtera”***.

DAFTAR PUSTAKA

Utami, Novia Widya, *Manfaat, Faktor yang Memengaruhi, dan Contoh Analisis SWOT*, jurnal.id, 2017

Djunaedi, Achmad, dkk, *Mengembangkan Kota dan Kabupaten Cerdas: Sebuah Panduan bagi Pemerintah Daerah*, Fisipol UGM, 2017

Permadi, Dedy, *Menuju Kota-kota Sekunder Pintar: Pemetaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pelayanan Publik di 12 Kota Indonesia*, Habibie Center, 2015